

LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

BP3MI JAWA BARAT

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025



Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40275
Telpon/Fax : 022-7336965/7333212
E-mail : bp3mi.jabar@bp2mi.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, Januari 2026

Kepala BP3MI Jawa Barat


Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P.
NRP. 80091267

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA -
JAWA BARAT**

Jl. Soekarno Hatta No. 587, Kel. Binong, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
Telp.: 022- 7336965 www.bp2mi.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, Januari 2026
Kepala BP3MI Jawa Barat

Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P
NRP. 80091267

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp25.182.357 atau mencapai 0,00 persen. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat pada tidak ada estimasi terhadap Anggaran Pendapatan teresebut.

Realisasi Belanja Negara pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.638.116.069 atau mencapai 93.55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.302.341.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp13.229.133.924 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp78.340.434; Aset Tetap (netto) sebesar Rp13.112.420.090.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp42.091.252 dan Rp13.187.042.672.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.517.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp9.245.406.195 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp9.234.889.195. Surplus Kegiatan Non Operasional

dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp14.665.357 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp9.220.223.838.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp12.706.971.266 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp9.220.223.838 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.700.295.244 dengan penurunan Ekuitas sebesar Rp480.071.406 sehingga Ekuitas Entitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 13.187.042.672.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BP3MI JAWA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	TAHUN 2025				TAHUN 2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN						
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	0	25,182,357	25,182,357	0.00	27,743,143
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		0	25,182,357	25,182,357	0.00	27,743,143
BELANJA						
Belanja Pegawai	B.2	-	-	-	0.00	3,290,645,379
Belanja Barang	B.3	9,435,591,000	8,781,965,332	(653,625,668)	93.07	9,878,778,204
Belanja Modal	B.4	866,750,000	856,150,737	(10,599,263)	98.78	629,216,111
JUMLAH BELANJA		10,302,341,000	9,638,116,069	(664,224,931)	93.55	13,798,639,694

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR BP3MI JAWA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	78.340.434	46.398.164
JUMLAH ASET LANCAR		78.340.434	46.398.164
ASET TETAP			
Tanah	C.2	8.573.442.000	8.573.442.000
Peralatan dan Mesin	C.3	6.715.165.775	5.854.082.098
Gedung dan Bangunan	C.4	3.550.296.828	3.550.296.828
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.5	(5.726.484.513)	(5.301.674.704)
JUMLAH ASET TETAP		13.112.420.090	12.676.146.222
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.6	-	73.084.772
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	-	(73.084.772)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.8	73.084.772	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.9	(73.084.772)	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.10	38.373.400	26.626.746
Aset Lain-lain	C.11	106.802.700	1.206.889.250
AKUMULASI PENYUSUTAN /AMORTISASI ASET LAINNYA	C.12	(106.802.700)	(1.206.889.250)
JUMLAH ASET LAINNYA		38.373.400	26.626.746
JUMLAH ASET		13.229.133.924	12.749.171.132
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	42.091.252	42.199.866
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		42.091.252	42.199.866
JUMLAH KEWAJIBAN		42.091.252	42.199.866
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	13.187.042.672	12.706.971.266
JUMLAH EKUITAS		13.187.042.672	12.706.971.266
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13.229.133.924	12.749.171.132

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BP3MI JAWA BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2025	31 DES 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	✓ 10,517,000	9,717,000
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		10,517,000	9,717,000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		10,517,000	9,717,000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	✓ -	3,112,741,353
Beban Persediaan	D.3	91,736,880	87,850,941
Beban Barang dan Jasa	D.4	5,829,298,041	6,612,230,303
Beban Pemeliharaan	D.5	326,054,293	408,397,973
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,518,272,580	2,758,283,701
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	480,044,401	345,737,909
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		9,245,406,195	13,325,242,180
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN		(9,234,889,195)	(13,315,525,180)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset	D.9	✓ 11,465,357	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	✓ 3,200,000	18,026,143
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		14,665,357	18,026,143
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9,220,223,838)	(13,297,499,037)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(9,220,223,838)	(13,297,499,037)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR BP3MI JAWA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	12,706,971,266	11,603,575,325
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9,220,223,838)	(13,297,499,037)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	970,856
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nila Aset Tetap Non Revaluasi		0	970,856
JUMLAH		0	970,856
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	9,700,295,244	14,399,924,122
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	480,071,406	1,103,395,941
EKUITAS AKHIR	E.6	13,187,042,672	12,706,971,266

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BP3MI Jawa Barat

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat sebelumnya disebut Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung sebelumnya disebut Balai Antar Kerja Antar Negara (**BALAI AKAN**) yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 23 Tahun 1984, Kemudian berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep- 137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Setelah adanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 sesuai amanat UU No. 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2019 sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen dengan Visi **“Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi BP2MI sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
2. Meningkatkan pelayanan penempatan TKI yang mudah, murah, cepat, dan aman;
3. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan TKI;
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BP3MI Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BP3MI Jawa Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari BP3MI Jawa Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BP3MI Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ a tau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui hendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP / TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP / TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pertama Kali

Mulai Tahun 2015 Pemerintah Mengimplementasikan Akuntansi berbasis Akrua sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per September 2017 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pada tahun 2023 adalah merupakan implementasi pertama.

(9) Capaian output strategis Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung.

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2024, output strategis yang telah dicapai oleh Satker Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) adalah sebagai berikut :

No.	Kode	Uraian Output	Alokasi	Realisasi	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran
1.	3894. BAA-001	Pelayanan penempatan PMI oleh pemerintah	2.145.836.000	1.657.179.506	76,77	27.868	21.393
2.	3894. EBA-962	Layanan Umum	250.000.000	223.437.017	100	1	1
3.	3894. QAA-001	Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia	197,760,000	176,140,014	100	40	40
4.	4894. QAA-002	Rehabilitasi dan Reintegrasi Purna Pekerja Migran Indonesia	94.760.000	59.590.900	100	40	40
5.	3894. QAA-003	Pelayanan Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia	3.549.717.000	2,706,699,390	78,43	102	80
6.	4587. EBA- 994	Layanan Perkantoran	4.064.268.000	3,961,622,309	1	1	1

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode yang berjalan, BP3MI Jawa Barat telah mengadakan revisi ke-10 pada tanggal 31 Desember 2025 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pagu awal sebesar Rp11.640.311.000 setelah direvisi menjadi sebesar Rp10.302.341.000, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	11,288,161,000	9,435,591,000
Belanja Modal	352,150,000	866,750,000
Jumlah Belanja	11,640,311,000	10,302,341,000

Revisi tersebut berupa adanya pengurangan belanja barang dan penambahan belanja modal, pemutakhiran data revisi POK, Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dan Revisi DJA Efisiensi. Adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yang merubah anggaran DIPA awal pada Tahun Anggaran 2025 BP3MI Jawa Barat.

Tabel Penambahan/Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Pegawai TA 2025

No	Uraian	Pagu Semula	Pagu Revisi	Penambahan/ Pengurangan
1	Barang Operasional	3,059,769,000	2,353,605,000	(706,164,000)
2	Belanja Bahan	2,722,922,000	1,674,434,000	(1,048,488,000)
3	Barang Persediaan	183,300,000	126,210,000	(57,090,000)
4	Barang Jasa	2,620,850,000	2,207,980,000	(412,870,000)
5	Belanja Pemeliharaan	389,800,000	328,395,000	(61,405,000)
6	Perjalanan Dalam Negeri	2,311,520,000	2,744,967,000	433,447,000
7	Peralatan dan Mesin	352,150,000	866,750,000	514,600,000

Realisasi
Pendapatan
Rp25,182,357

B. 1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.182.357 atau mencapai 0,00 persen tidak ada estimasi pendapatan yang ditetapkan pada BP3MI Jawa Barat. Pendapatan BP3MI Jawa Barat berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	25,182,357	0.00%
Pendapatan Lain-Lain	0	-	0.00%
Jumlah	0	25,182,357	0.00%

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan 9,23 persen dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya penurunan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyelesaian TGR	3,200,000	11,835,500	(72.96)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	35,150	(100.00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	6,155,493	(100.00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10,325,357	0	100.00
Pendapatan Sewa Gedung & Bangunan	10,517,000	9,717,000	8.23
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung & Bangunan	1,140,000	0	100.00
Jumlah	25,182,357	27,743,143	(9.23)

Pendapatan penerimaan dengan rincian terdiri dari :

No	NTB	NTPN	Jumlah
1	250502033364	FD4B67QLV2D0STLE	500,000
2	915675143627	094946U8F877IA0D	2,700,000
3	881843409161	BACFD0NA0EBUDDBI	1,140,000
4	477202671697	5A54F48VVO3RA0EB	10,517,000
5	761852375060	F3F5F7QLV21FR8F0	10,325,357
Jumlah			25,182,357

Realisasi Belanja
Negara
Rp9,638,116,069

B. 2 Belanja

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.638.116.069 atau 93,55 persen dari anggaran belanja sebesar Rp10.302.341.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

URAIAN	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0.00%
Belanja Barang	9,435,591,000	8,781,965,332	93.07%
Belanja Modal	866,750,000	856,150,737	98.78%
Jumlah	10,302,341,000	9,638,116,069	93.55%

Dibandingkan dengan Periode 31 Desember 2025 Realisasi Belanja periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 30,15 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan antara lain:

1. Tidak adanya belanja pegawai;
2. Ada efisiensi Anggaran di masing-masing kegiatan.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	3.290.645.379	(100,00)
Belanja Barang	8.781.965.332	9.878.778.204	(11,10)
Belanja Modal	856.150.737	629.216.111	36,07
Jumlah	9.638.116.069	13.798.639.694	(30,15)

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.290.645.379. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari realisasi belanja pada untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya perpindahan belanja pegawai ke Eselon I dengan mekanisme pembayaran gaji, uang makan, tunjangan kinerja dan lembur terpusat.

Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	1.322.761.022	(100,00)
Belanja Uang Makan PNS	0	89.491.000	(100,00)
Uang Lembur PNS	0	10.254.000	(100,00)
Tunjangan Kinerja PNS	0	1.190.519.753	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	412.928.576	(100,00)
Belanja Uang Makan PPPK	0	24.013.000	(100,00)
Tunjangan Kinerja PPPK	0	250.639.466	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	3.300.606.817	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	0	(9.961.438)	(100,00)
Jumlah Belanja	0	3.290.645.379	(100,00)

Belanja Barang
Rp8.781.965.332

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.781.965.332 dan Rp9.878.778.204. Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan 11.10 persen dari Realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya pengurangan kegiatan yang berupa sosialisasi penempatan dan perlindungan PMI SMK 1 paket dan sosialisasi perguruan tinggi 2 paket dan Verifikasi Dokumen G to G Korea Selatan 3 lokasi.

Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.331.732.650	2.238.366.580	4,17
Belanja Barang Non Operasional	1.395.219.582	2.262.972.369	(38,35)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	123.679.150	100.275.611	23,34
Belanja Jasa	2.087.007.077	2.110.481.970	(1,11)
Belanja Pemeliharaan	326.054.293	408.397.973	(20,16)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.518.272.580	2.758.283.701	(8,70)
Jumlah Belanja	8.781.965.332	9.878.778.204	(11,10)

Belanja Modal
Rp856.150.373

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp856.150.737 dan Rp627.748.852. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu untuk periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,32 persen dibandingkan 31 Desember 2024 disebabkan adanya belanja sarana dan prasarana layanan Kantor BP3MI di Bandung, P4MI dan LTSA/LTSP di wilayah Jawa Barat yang sudah usang sehingga perlu peningkatan belanja modal disebabkan adanya pembelian sarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satker serta pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	856,150,737	629,216,111	26.51
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	198,532,741	3.32
Jumlah Belanja	856,150,737	827,748,852	3.32

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 . Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp78,340,434 dan Rp46.398.164.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
Barang Konsumsi	✓ 78,340,434	46,398,164
Jumlah	78,340,434	46,398,164

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname/Pemeriksaan Fisik Persediaan nomor : BA.52/10.10/PL.03.02/I/2026 tanggal 02 Januari 2026. Tetapi masih terdapat barang konsumsi senilai Rp78,340,434 dalam kondisi baik yang disajikan dalam Persediaan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Daftar Barang Persediaan

Kode	Uraian	Rupiah Per 31-12-2025
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	8,911,084
1010301002	Tulis, Tinta Stempel	2,548,330
1010301003	Penjepit Kertas	2,401,832
1010301004	Penghapus/Korektor	797,569
1010301005	Buku Tulis	1,478,994
1010301006	Ordner Dan Map	11,604,290
1010301007	Penggaris	159,200
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1,101,070
1010301010	Alat Perekat	2,146,360
1010301012	Staples	681,000
1010301013	Isi Staples	233,905
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,611,800
1010302001	Kertas HVS	11,821,000
1010302002	Berbagai Kertas	1,564,000
1010302004	Amplop	1,398,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	2,640,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	14,794,000
1010304005	USB/Flash Disk	3,857,000
1010304010	Mouse	2,905,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	5,686,000
Total		78,340,434

Tanah Rp8.573.442.000

C.2. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BP3MI Jawa Barat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.573.442.000 dan Rp8.573.442.000, tidak ada mutasi tanah pada per 31 Desember 2025.

Tanah seluas 943,00 M² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 587 Rt.03 Rw.09 Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	943 m2	Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287	8.573.442.000
Jumlah			8.573.442.000

Peralatan dan Mesin

Rp.6.763.798,275

C.3. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp6.763.798.275 dan Rp5.854.082.098. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5,854,082,098
Mutasi Tambah:	943,660,177
Pembelian	856,150,737
Transfer masuk	87,509,440
Reklasifikasi masuk	0
Mutasi Kurang:	33,944,000
Ekstrakomptabel	27,194,000
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	1,106,836,550
Akumulasi Peny. Aset Tetap yang Tidak Digunakan	(1,100,086,550)
Saldo per 31 Desember 2025	6,763,798,275
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(5,124,587,629)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,639,210,646

A. Mutasi Tambah :

1. Pembelian sebesar Rp856.150.373,-

a. Intrakomptabel sebesar Rp828.956.737,-

Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa Aset Tetap Yang digunakan transaksi pembelian peralatan dan mesin :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor Listrik (Indomobil Emotor Tyranno A/T/2025)	1	Rp 25,949,999	Rp 25,949,999	BPK/IE/09/25/00001, tanggal 24-09-2025
2	Filing Cabinet Besi (Frontline)	5	Rp 3,400,000	Rp 17,000,000	BA.4378/10.10/PL02.03 /XII/2025, tanggal 23-12-2025
3	Alat Penghancur Kertas (Krisbow Paper Shradder RPH BAST/KWT)	1	Rp 4,769,900	Rp 4,769,900	KWT 00020, tanggal 01-12-2025
4	LCD Projector/Infocus (Projector Cherlux)	1	Rp 4,944,000	Rp 4,944,000	BA.1089/BP3MI10/PL0 3.01/V/2025, tanggal 16-05-2025
5	LCD Projector/Infocus (Proyektor Infocus IN2115)	7	Rp 9,435,000	Rp 66,045,000	EP-01KATKPTQ72SMEARP1 MHWROZ8Y, tanggal 01-12-2025
6	A.C. Split (Panasonic 2 PK)	7	Rp 11,655,000	Rp 81,585,000	BA.4278/10.10/PL02.03 /XII/2025, tanggal 15-12-2025
7	Loudspeaker (Polytron)	4	Rp 2,098,550	Rp 8,394,200	773/Nov/2025, tanggal 25-11-2025
8	Loudspeaker (Sony)	2	Rp 5,300,098	Rp 10,600,196	773/Nov/2025, tanggal 25-11-2025
9	Loudspeaker (Yamaha)	1	Rp 54,439,950	Rp 54,439,950	EP-01KATMKSK9Y4R62WG 3EQB2NB6N, tanggal 08-12-2025
10	Voice Recorder (Hollyland LARK m2 Duo Combo)	1	Rp 2,110,000	Rp 2,110,000	BA.3488/10.10/PL03.01 /X/2025, tanggal 21-10-2025
11	Voice Recorder (Hollyland Lark M2)	1	Rp 1,480,000	Rp 1,480,000	BP.SI.25.12.00006, tanggal 01-12-2025
12	Camera Digital (Sony a 7CL II)	1	Rp 34,999,000	Rp 34,999,000	BP.SI.25.12.00006, tanggal 01-12-2025
13	Camera Digital (DJI Osmo Pocket 3)	1	Rp 8,463,000	Rp 8,463,000	BA.4361/10.10/PL02.02 /XII/2025, tanggal 22-12-2025
14	Lighting (Godox)	1	Rp 5,850,000	Rp 5,850,000	BA.4361/10.10/PL02.02 /XII/2025, tanggal 22-12-2025
15	P.C Unit (ACER AIO ASPIRE)	3	Rp 10,516,300	Rp 31,548,900	BA.1186/BP3MI10/PL0 3.01/V/2025, tanggal 19-05-2025
16	P.C Unit (ACER AIO ASPIRE)	2	Rp 10,005,800	Rp 20,011,600	BA.2474/10.10/PL03.01 /VIII/2025, tanggal 04-08-2025
17	P.C Unit (ACER AIO ASPIRE)	4	Rp 10,158,950	Rp 40,635,800	BA.3494/10.10/PL03.01 /X/2025, tanggal 24-10-2025
18	P.C Unit (ACER AIO ASPIRE)	1	Rp 10,158,950	Rp 10,158,950	BA.2479/10.10/PL03.01 /X/2025, tanggal 21-10-2025
19	P.C Unit (LENOVO AIO)	11	Rp 15,950,000	Rp 175,450,000	EP-01KATJKOG2XF8ZRM84 RR6E9MG6, tanggal 08-12-2025
JUMLAH				Rp 604,435,495	

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Kuitansi/BAST
1	2	3	4	5	6
Lanjutan Total				Rp 604,435,495	
20	P.C Unit (LENOVO AIO)	1	Rp 15,949,995	Rp 15,949,995	EP- 01KATJK0G2XF8ZRM84RR6 E9MG6, tanggal 08-12- 2025
21	Laptop (HP ENVY)	2	Rp 16,336,000	Rp 32,672,000	BA.1186/BP3MI10/PL.03.0 1/V/2025, tanggal 16-05- 2025
22	Laptop (MSI KATANA)	1	Rp 16,642,300	Rp 16,642,300	BA.1088/BP3MI10/PL.03.0 1/V/2025, tanggal 16-05- 2025
23	Laptop (Lenovo IDEAPAD)	1	Rp 13,121,950	Rp 13,121,950	BA.2479/10.10/PL.03.01/X/ 2025, tanggal 21-10-2025
24	Laptop (Lenovo Notebook K14))	6	Rp 15,950,000	Rp 95,700,000	EP- 01KATK05410TRBRZR9WW F851R1, tanggal 08-12- 2025
25	Laptop (Lenovo Notebook K14))	1	Rp 15,949,997	Rp 15,949,997	01KATK05410TRBRZR9WW F851R1, tanggal 08-12- 2025
26	Printer (Peralatan Personal Komputer) (Epson L-5290)	1	Rp 3,935,000	Rp 3,935,000	BA.1096/BP3MI10/PL.03.0 1/V/2025, tanggal 16-05- 2025
27	Printer (Peralatan Personal Komputer) (Epson L-3251)	3	Rp 2,550,000	Rp 7,650,000	BA.3493/10.10/PL.03.01/X/ 2025, tanggal 21-10-2025
28	Printer (Peralatan Personal Komputer) (Epson L-3251)	7	Rp 2,550,000	Rp 17,850,000	KWT 00027, tanggal 15-12- 2025
29	Tabung OXigen (O2)	1	Rp 1,050,000	Rp 1,050,000	00061T, tanggal 09-05- 2025
30	Plang Nama (Tanah Titipan KPK)	3	Rp 1,333,333	Rp 4,000,000	00219T, tanggal 06-11- 2025
JUMLAH				Rp 828,956,737	

b. Ekstrakomptabel sebesar Rp27.668.400,-

Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa Aset Tetap Ekstrakomptabel yang transaksi pembelian menggunakan belanja modal (532111) dengan rincian Kursi Besi/Metal.

2. Transfer Masuk sebesar Rp87.509.440

Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa Aset Tetap Yang digunakan transaksi transfer masuk peralatan dan mesin dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KP2MI dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Router (Mikrotik Routerboard)	1	Rp 1,183,260	Rp 1,183,260	BA.1889/08/PL.03.07/V/2025, tanggal 02-06-2025
2	Anjungan Informasi Mandiri (AIM) V.02-19"	1	Rp 33,144,600	Rp 33,144,600	BA.3066/08/PL.03.08/VII/2025, tanggal 01-08-2025
3	Anjungan Informasi Mandiri (AIM) V.03-55"	1	Rp 51,485,500	Rp 51,485,500	BA.3066/08/PL.03.08/VII/2025, tanggal 01-08-2025
4	Rak Server (Indorack-WIR4505S)	1	Rp 1,696,080	Rp 1,696,080	BA.4453/08/PL.03.03/XI/2025, tanggal 05-11-2025
JUMLAH				Rp 87,509,440	

B. Mutasi Kurang :

1. Ekstrakomptabel sebesar Rp30.668.400,-

- Mutasi Kurang sebesar Rp27.194.000,- berupa perlatan dan mesin dari perolehan belanja modal (532111) yang memiliki harga satuan dibawah minimal kapitalisasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Kursi Besi/Metal (Lumos Managerial Chair High)	6	Rp 899,500	Rp 5,397,000	772/Nov/2025, Tgl 25-11-2025
2	Kursi Besi/Metal (Neo Flyx Chrome Banquet Chair)	50	Rp 328,000	Rp 16,400,000	770/Nov/2025, Tgl 25-11-2025
3	Kursi Besi/Metal (Lumos Managerial Chair High)	6	Rp 899,500	Rp 5,397,000	592/Dec/2025, Tgl 15-12-2025
JUMLAH				Rp 27,194,000	

Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) sebesar Rp3.474.400,- berupa perlatan dan mesin berupa yang nilainya di bawah batas minimal kapitalisasi aset tetap sehingga tidak tercatat dalam nilai neraca barang intrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Alat Penghancur Kertas (Krisbow)	2	Rp 778,000	Rp 1,556,000	BA.1551/BP3MI10/PL.03.01/VI/2025, tanggal 25-06-2025
2	Wireless Access Point (Ceiling Access Point)	2	Rp 959,200	Rp 1,918,400	00005/UP_TUP/426355/2025, tanggal 07-05-2025
JUMLAH				Rp 3,474,400	

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp1.106.836.550, dan diklasifikasikan dari aset tetap ke aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	2	3	4
1	Alat Kantor	15	Rp 82,087,000
2	Alat Rumah Tangga	49	Rp 163,687,900
3	Alat Studio	13	Rp 134,076,500
4	Alat Komunikasi	12	Rp 45,446,000
5	Alat Khusus Kepolisian	1	Rp 14,850,000
6	Komputer Unit	37	Rp 435,508,150
7	Peralatan Komputer	37	Rp 231,180,000
JUMLAH		164	Rp 1,106,836,550

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan Bangunan
Rp3.550.296.828

C.4. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah Rp3.550.296.828 dan Rp3.387.336.167. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3,550,296,828
Mutasi tambah :	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang :	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2025	3,550,296,828
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(650,529,384)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2,899,767,444

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp5.775.117.013 dan Rp5.301.674.704. Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8.573.442.000	0	8.573.442.000
2	Peralatan dan Mesin	6.715.165.775	5.075.955.129	1.639.210.646
3	Gedung dan Bangunan	3.550.296.828	650.529.384	2.899.767.444
Akumulasi Penyusutan		18.838.904.603	5.726.484.513	13.112.420.090

C.6. Piutang Tagihan TP/TGR

Saldo Tagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp73.084.772. Rangkuman Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi hasil pemeriksaan BPK RI TA 2018 berupa Konsumsi PAP CTKI, penyerahan pengurusan Piutang TGR atas nama CV. Nugraha Pratama kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jakarta melalui Kepada KPKNL Jakarta III sesuai dengan nomor surat B.173/SU/VI/202 tanggal 11 Juni 2020 hal Penyerahan pengurusan piutang CV. Nugraha Pratama. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Tagihan TP/TGR	-	73.084.772	(100,00)
Jumlah	-	73.084.772	(100,00)

C.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp73.084.772.

Rangkuman Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2025 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	kenaikan (penurunan)
Jangka Panjang	-	73.084.772	-100,00
Jumlah	-	73.084.772	-100,00

C.8. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Tagihan Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp73.084.772 dan Rp. Rangkuman Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi hasil pemeriksaan BPK RI TA 2018 berupa Konsumsi PAP CTKI, penyerahan pengurusan Piutang TGR atas nama CV. Nugraha Pratama kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jakarta melalui Kepada KPKNL Jakarta III sesuai dengan nomor surat B.173/SU/VI/202 tanggal 11 Juni 2020 hal Penyerahan pengurusan piutang CV. Nugraha Pratama. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Tagihan TP/TGR	73.084.772	-	100
Jumlah	73.084.772	-	100

C.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp73.084.772 dan Rp.0. Rangkuman Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	kenaikan (penurunan)
Jangka Panjang	73.084.772	-	100
Jumlah	73.084.772	-	100

Aset Lainnya Rp38.373.400

C.10. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp38.373.400 dan Rp26.626.746. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya terdiri pada kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat terdiri dari Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Dana Yang Dibatasi

Penggunaannya Rp38.373.400

C.10.1. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp38.373.400 dan Rp26.626.746. Surat Perintah Membayar RPATA Penampungan penyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2025 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	kenaikan (penurunan)
Jasa Tenaga Driver atau Pengemudi	-	6.626.746	-100
Jasa Tanaga Ahli Daya Petugas Bandara	-	20.000.000	-100
Jasa Konsumsi OPP CPMI	38.373.400	-	100
Jumlah	38.373.400	26.626.746	44,12

Aset Lain-lain Rp155.435.200

C.10.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp155.435.200 dan Rp1.206.889.250. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BP3MI Jawa Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	1.206.889.250
Mutasi Tambah :	
Penghentian Penggunaan BMN	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang :	
Penggunaan Kembali BMN yang Diberhentikan	-
Penghapusan BMN	(1.051.454.050)
Saldo Per 31 Desember 2025	155.435.200
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(155.435.200)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	-

Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya
Rp155.435.200

C.10.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp155.435.200 dan Rp1.206.889.250. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Total
Peralatan dan Mesin	1.206.889.250	1.051.454.050	155.435.200
Total	1.206.889.250	1.051.454.050	155.435.200

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp42.091.252

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp42.091.252 dan Rp42.199.866. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jasa Konsumsi OPP CPMI 2025	28.215.000	RPATA Pembayaran 2026
2	Listrik Desember 2025	10.511.237	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2026
3	Telepon Desember 2025	3.365.015	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2026
	Jumlah	42.091.252	

Ekuitas Rp13.187.042.762

C.12. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.187.042.672 dan Rp12.706.971.266. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp10.517.000

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.517.000 dan Rp9.717.000. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10,517,000	9,717,000	8.23
Jumlah	10,517,000	9,717,000	100.00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dari BPJS Ketenagakerjaan PMI selama Tahun 2025.

Beban Pegawai Rp0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.112.741.353. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	0	993,308,100	(100.00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	15,772	(100.00)
Beban Tunjangan-Tunjangan Gaji PNS	0	319,475,712	(100.00)
Beban Uang Makan PNS	0	75,235,000	(100.00)
Beban Lembur PNS	0	10,254,000	(100.00)
Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja) PNS	0	1,040,383,451	(100.00)
Beban Gaji Pokok PPPK	0	306,367,200	(100.00)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	6,336	(100.00)
Beban Tunjangan-Tunjangan Gaji PPPK	0	106,555,040	(100.00)
Beban Uang Makan PPPK	0	22,530,000	(100.00)
Beban Pegawai (Tunj. Kinerja) PNS PPPK	0	238,610,742	(100.00)
Jumlah	0	3,112,741,353	(100.00)

Beban Persediaan
Rp91.736.880

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp91.736.880 dan Rp87.850.941. Beban Persediaan merupakan Beban untuk mencatat penggunaan atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	91,736,880	87,850,941	4.42
Jumlah	91,736,880	87,850,941	4.42

Beban Barang dan
Jasa
Rp5.829.298.041

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.829.298.041 dan Rp6.612.230.303. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa Konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya realisasi peralatan dan mesin-ekstrakomtabel, honor output kegiatan, belanja jasa sewa. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2,236,829,669	2,050,646,439	9.08
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,266,800	7,731,615	(31.88)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	85,870,000	72,780,000	17.99
Beban Barang Operasional Lainnya	3,766,181	107,208,526	(96.49)
Beban Bahan	1,162,999,178	1,116,296,277	4.18
Beban Honor Output Kegiatan	0	859,045,000	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	218,587,604	234,251,092	(6.69)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	30,668,400	55,600,000	(44.84)
Beban Langganan Listrik	147,491,099	175,134,688	(15.78)
Beban Langganan Telepon	49,273,579	12,649,715	289.52
Beban Langganan Air	683,400	527,600	29.53
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	31,101,636	66,193,818	(53.01)
Beban Jasa Sewa	1,236,560,495	1,293,465,533	(4.40)
Beban Jasa Profesi	620,200,000	560,700,000	10.61
Jumlah	5,829,298,041	6,612,230,303	(11.84)

Beban
Pemeliharaan
Rp326.054.293

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp326.054.293 dan Rp408.397.973. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan Beban Pemeliharaan disebabkan karena penurunan alokasi anggaran pemeliharaan dan sebagian jumlah Aset yang dipelihara lebih sedikit karena dampak dari penghentian Aset dari penggunaannya pada Aplikasi Sakti Role Aset . Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156,181,261	215,897,111	(27.66)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151,931,794	192,500,862	(21.07)
Beban Pemeliharaan Lainnya	17,941,238	-	100.00
Jumlah	326,054,293	408,397,973	(20.16)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.518.272.580

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.518.272.580 dan Rp2.758.283.701. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan Beban Perjalanan Dinas karena adanya tidak adanya kegiatan Kawan Pekerja Migran Indonesia dan efisiensi anggaran yang berdampak pada sosialisasi ke desa kab./kota dan SMK, untuk periode yang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,329,220,080	1,333,309,180	(0.31)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,053,100,000	949,150,000	10.95
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,420,000	74,000,000	(95.38)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	132,532,500	401,824,521	(67.02)
Jumlah	2,518,272,580	2,758,283,701	(8.70)

Beban Penyusutan
Dan Amortisasi
Rp480.044.401

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.480.044.401 dan Rp345.737.909. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	409,293,285	274,986,793	48.84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	70,751,116	70,751,116	0.00
Jumlah Penyusutan	480,044,401	345,737,909	38.85
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	480,044,401	345,737,909	38.85

Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp11.465.357

D.8. Kegiatan Non Operasional

D.8.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan penjualan aset non lancar, maka harus ada Akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp11.465.357 dan Rp0. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode yang berakhir 31 Desember 2024

URAIAN PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	11,465,357	0	100.00
Jumlah Surplus/(Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	11,465,357	0	100.00

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya yaitu hasil penjualan lelang dari penghapusan Aset BMN yang rusak berat satker BP3MI Jawa Barat.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp3.200.000

D.9 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.200.00 dan Rp18.026.143. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN PENDAPATAN dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	31 DES 2025	31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	35,150	(100.00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3,200,000	17,990,993	(82.21)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,200,000	18,026,143	(82.25)

Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dari setoran atas kelebihan honorarium Tahun Januari sd. Agustus 2018.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp12.706.971.266

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas untuk pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.706.971.266 dan Rp11.603.575.325.

Defisit LO

Rp9.220.223.838

E.2. Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.220.223.838 dan Rp13.297.499.037. Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Aset

Non Revaluasi

Rp0

E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Ro0 dan Rp970,856. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi Antar

Entitas

Rp9.700.295.244

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.700.295.244 dan Rp14.399.924.122. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	9,638,116,069
Diterima ke Entitas Lain	(25,182,357)
Transfer Masuk	87,361,532
Jumlah	9,700,295,244

E.4.1 Diterima Entitas Lainnya (DDEL/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 DKEL sebesar Rp9638.116.069 sedangkan DDEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Rp25.182.357.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp87.361.532 terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Pusat Data dan Informasi KP2MI	87,509,440
Jumlah			87,509,440

Nilai transfer masuk setelah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Entitas Asal	Jumlah	Nilai Perolehan
1	2		3	4
1	Router (Mikrotik Routerboard)	Pusat Data dan Informasi KP2MI	1	1,183,260
2	Anjungan Informasi Mandiri (AIM) V.02-19"	Pusat Data dan Informasi KP2MI	1	33,144,600
3	Anjungan Informasi Mandiri (AIM) V.03-55"	Pusat Data dan Informasi KP2MI	1	51,485,500
4	Rak Server (Indorack-WIR4505S)	Pusat Data dan Informasi KP2MI	1	1,696,080
JUMLAH				Rp 87,509,440
PENYUSUTAN				Rp (147,908)
NILAI				Rp 87,361,532

Ekuitas Akhir

Rp13.187.042.672

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.187.042.672 dan Rp12.706.971.266.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang tercatat setelah tanggal neraca

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada kejadian penting yang tercatat temuan dan tindak lanjutan temuan BPK.

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Tidak ada daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3MI) Jawa Barat adalah Bank BRI Virtual Accaount 65284263551000 Nama Rekening BPG 022 BP3TKI Bandung.

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2415 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2025.

No	Jabatan	Semula	Menjadi
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Mulia Nugraha, S.I.K., M.H	Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P
2.	Kuasa Pengguna Barang	Mulia Nugraha, S.I.K., M.H	Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P

KANTOR BP3MI JAWA BARAT
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN
AKUMULASI PENYUSUTAN DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE TAHUN 2025

NO	KODE	ASSET TETAP	MASA MANFAAT	NILAI PEROLEHAN	SALDO AWAL	BEBAN PENY. 31-12-2025	AKM. PENY. PER 31-12-2025	NILAI BUKU
	1	2	3	5	6	7	8	7
1	132111	PERALATAN DAN MESIN		6,763,798,275	(4,721,896,436)	(402,691,193)	(5,124,587,629)	1,639,210,646
2	3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	1,928,886,999	(1,375,401,289)	(103,674,999)	(1,479,076,288)	449,810,711
3	3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4	66,435,000	(66,435,000)	0	(66,435,000)	0
4	3.05.01	ALAT KANTOR	5	704,813,000	(578,018,610)	(16,913,710)	(594,932,320)	109,880,680
5	3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	1,761,474,271	(1,390,679,310)	(67,040,605)	(1,457,719,915)	303,754,356
6	3.06.01	ALAT STUDIO	5	172,662,504	(99,890,631)	(11,501,001)	(111,391,602)	61,270,902
7	3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	138,370,610	(118,852,410)	(5,493,800)	(124,346,210)	14,024,400
8	3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	59,400,000	(59,400,000)	-	(59,400,000)	0
9	3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5	1,050,000	-	(105,000)	(105,000)	945,000
10	3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5	11,979,000	(11,979,000)	-	(11,979,000)	0
11	3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	53,577,860	(41,840,254)	(6,711,357)	(48,551,611)	5,026,249
12	3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	1,424,923,441	(784,807,562)	(128,131,225)	(912,938,787)	511,984,654
13	3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	440,225,590	(194,592,400)	(63,119,496)	(257,711,896)	182,513,694
14	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		3,550,296,828	(579,778,268)	(70,751,116)	(650,529,384)	2,899,767,444
15	4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	3,550,296,828	(579,778,268)	(70,751,116)	(650,529,384)	2,899,767,444
Jumlah Akm. Penyusutan Aset Tetap				10,314,095,103	(5,301,674,704)	(473,442,309)	(5,775,117,013)	4,538,978,090

*Beban Amortisasi

Bandung, 23 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
BP3MI Jawa Barat

Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P.
NRP. 80091267



Lampiran A2

BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3MI) JAWA BARAT

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

BA /UAPA : 104 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Eselon 1/UAPPA-E1 : 01 Sekretariat Utama BP2MI
UAPPA-W : 0200 Propinsi Jawa Barat
Satuan Kerja/UAKPA : 426355 BP3MI Jawa Barat

No	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	522119	Jasa Konsumsi OPP CPMI P4MI Bekasi Tahun 2025	Rp 28,215,000	Rp -	Rp -	Rp 28,215,000	Tagihan Kuitansi/Invoice Termin XI 2025
2	522112	Beban Belanja Telepon	Rp 3,365,015	Rp -	Rp -	Rp 3,365,015	Tagihan Kuitansi Bulan Desember 2025
3	522111	Beban Belanja Langgana Listrik	Rp 10,511,237	Rp -	Rp -	Rp 10,511,237	Tagihan Kuitansi Bulan Desember 2025
JUMLAH			Rp 42,091,252	Rp -	Rp -	Rp 42,091,252	

Bandung, Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
BP3TKI Bandung

Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P.
NRP. 80091267

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : (104) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
 Wilayah : (1200) Provinsi Jawa Barat
 Satuan Kerja : (426355) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat
 No. Dokumen : 00004A
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2025 yang akan dibayar di bulan Januari 2026

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Beban Dibayar Dimuka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Beban Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Pitang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas Lainnya Dan Setara Kas Di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Beban-Aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		10,511,237
	D	522111	Beban Langganan Listrik	10,511,237	

Dibuat oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen

Didit Kurniawan, S.Si.
NIP. 19820802201012 1 003

Tanggal : 31 Desember 2025



Direkam oleh :
Pengelolaan Keuangan

Sandi Baredi, S.Kom.
NIP. 198203122009121002

Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : (104) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
 Wilayah : (1200) Provinsi Jawa Barat
 Satuan Kerja : (426355) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat
 No. Dokumen : 00003A
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2025 yang akan dibayar di bulan Januari 2026

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Beban Dibayar Dimuka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Beban Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas Lainnya Dan Setara Kas Di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Beban-Aset
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		3,365,015
	D	522112	Beban Langganan Telepon	3,365,015	

Dibuat oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen

Didit Kurniawan, S.Si.
NIP. 19820802201012 1 003

Tanggal : 31 Desember 2025



Disetujui oleh :
Kepala Pengguna Anggaran

Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P.
NRP. 80091267

Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :
Pengelolaan Keuangan

Sandi Baredi, S.Kom.
NIP. 198203122009121002

Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : (104) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
 Wilayah : (1200) Provinsi Jawa Barat
 Satuan Kerja : (426355) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat
 No. Dokumen : 260220000000296
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2025 yang akan dibayar di bulan Januari 2026

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Beban Dibayar Dimuka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Beban Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Pitang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas Lainnya Dan Setara Kas Di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Beban-Aset
☐	Persediaan	☒	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		28,215,000
	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	28,215,000	

Dibuat oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen

Didit Kurniawan, S.Si.
NIP. 19820802201012 1 003

Tanggal : 31 Desember 2025



Ditetapkan oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran

Singih Hermawan, S.I.K., M.A.P.
NRP. 80091267

Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :
Pengelolaan Keuangan

Sandi Baredi, S.Kom.
NIP. 198203122009121002

Tanggal : 31 Desember 2025



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BP2MI**

**BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI)
JAWA BARAT**

LAMPIRAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 57/PB/2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

KERTAS KERJA TELAAH
LK

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (426355) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat

Kode dan Nama UAPPAW : (0200) Jawa Barat

Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Sekretariat Utama BP2MI

Kode dan Nama K/L : (104) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓
a.	Pagu/DIPA		✓
b.	Estimasi PNBP		✓
c.	Belanja		✓

	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/1719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak

	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruai?		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√	Ya/Tidak
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		√	Tidak
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	√		Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak

	Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		√	Tidak
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		√	Tidak
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akruai BLU?		√	Tidak
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		√	Tidak
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?		√	Tidak

	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akruai BLU?		√	Tidak
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		√	Tidak
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		√	Tidak
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		√	Tidak
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		√	Tidak
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		√	Tidak
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		√	Tidak

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan

Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  Sandi Baredi NIP. 198203122009121002	Bandung, Januari 2026 Penelaah, Sondang Julianan NIP 198207272009122001
--	--